



Dari Kebijakan ke Praktik: Model Implementasi Platform Rapor Pendidikan di SMA dan SMK Kota Jayapura

Nur Jaya^{1*}, Agustinus Fatem², Yosephina Ohoiwutun³, Hiskia C.M Sapioper⁴

Program Studi Doktor Ilmu Sosial Administrasi Publik, Universitas Cendrawasih, Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Heram, Jayapura City, Papua, Indonesia 99224.

Email Korespondensi: nursurya78@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi kebijakan pendidikan berbasis data melalui Platform Rapor Pendidikan yang diluncurkan secara nasional, namun implementasinya di Kota Jayapura masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan kebijakan pada tingkat SMA dan SMK, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan model implementasi yang sesuai dengan konteks lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretivis dan desain studi kasus. Subjek penelitian melibatkan 28 informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri atas aktor kebijakan level makro (pemerintah dan legislatif), meso (dinas pendidikan dan kepala sekolah), dan mikro (guru, operator, komite, serta siswa). Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui reduksi, kategorisasi, dan interpretasi tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh SMA dan SMK di Kota Jayapura telah mengadopsi Platform Rapor Pendidikan, tetapi pemanfaatannya masih bersifat administratif dan belum sistematis. Data kuantitatif memperlihatkan fluktuasi capaian, termasuk penurunan literasi, iklim sekolah, dan kesejahteraan siswa. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah dan kepemimpinan, infrastruktur dan integrasi data, serta pelatihan dan pendampingan. Hambatan yang muncul mencakup keterbatasan kapasitas guru, ketidakmerataan infrastruktur, beban administrasi, dan rendahnya partisipasi komite sekolah. Penelitian ini menghasilkan model implementasi sembilan pilar dengan lima titik kendali utama: SOP perencanaan berbasis data, verifikasi data bulanan, forum refleksi triwulan, transparansi hasil, dan penguatan peran komite. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi kebijakan pendidikan berbasis data membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola kolaboratif, dan konsistensi kebijakan lintas level.

Kata kunci: Platform Rapor Pendidikan; Implementasi Kebijakan Pendidikan; Tata Kelola Sekolah.

From Policy to Practice: Modeling the Implementation of the Education Report Card Platform in Jayapura Senior and Vocational High Schools

Abstract

This study explores the implementation of the Education Report Card Platform in senior high schools and vocational high schools in Jayapura City, Papua, as part of Indonesia's national policy to strengthen data-driven education planning. The research aims to analyze how the platform is applied at the school level, to identify supporting and inhibiting factors, and to design an implementation model tailored to the local context. Employing a qualitative approach with an interpretivist paradigm and a case study design, data were collected through interviews, observations, and document analysis involving 28 purposively selected informants from macro (government and legislative), meso (education offices and school leaders), and micro (teachers, operators, committees, and students) levels. Thematic analysis was used to reduce, categorize, and interpret data. Findings indicate that all senior and vocational high schools in Jayapura City have formally adopted the Education Report Card Platform, yet its utilization remains largely administrative and inconsistent. Quantitative indicators show fluctuations, with declines in literacy, school climate, and student well-being. Supporting factors include government commitment, leadership, infrastructure, training, and cross-sector coordination, while barriers involve limited teacher capacity, uneven infrastructure, administrative burdens, and low committee participation. The study proposes a nine-pillar implementation model with five control points: standardized procedures, monthly verification, quarterly reflection forums, transparency, and stronger committee roles. These findings highlight that optimizing data-driven education policy requires institutional capacity building, collaborative governance, and policy coherence across levels.

Keywords: Education Report Card Platform; Education Policy Implementation; School Governance.

How to Cite: Jaya, N., Fatem , A., Ohoiwutun, Y., & Sapioper , H. C. (2025). Dari Kebijakan ke Praktik: Model Implementasi Platform Rapor Pendidikan di SMA dan SMK Kota Jayapura. *Empiricism Journal*, 6(3), 1091–1106. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3375>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3375>

Copyright© 2025, Jaya et al.
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Pendidikan menempati posisi fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai instrumen transfer pengetahuan, tetapi juga sarana pembentukan karakter, peningkatan daya saing, serta penguatan kohesi sosial dalam kehidupan berbangsa. Seiring perkembangan globalisasi dan era digital, pendidikan dihadapkan pada tuntutan baru untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi, kebutuhan keterampilan abad ke-21, serta tantangan ketimpangan akses yang masih mengemuka di berbagai wilayah Indonesia. Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan nasional diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis data guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran serta berorientasi pada peningkatan mutu.

Sebagai langkah strategis, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) meluncurkan Platform Rapor Pendidikan (PRP). Platform ini merupakan instrumen evaluasi berbasis data yang terintegrasi, memuat hasil *Asesmen Kompetensi Minimum* (AKM), *Survei Karakter*, dan *Survei Lingkungan Belajar*. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 dan Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022 yang menegaskan pentingnya asesmen pendidikan untuk menggambarkan secara menyeluruh capaian pembelajaran dan tata kelola pendidikan di setiap satuan pendidikan. Dengan menyediakan indikator kunci literasi, numerasi, karakter, dan kualitas lingkungan belajar, PRP dimaksudkan menjadi rujukan utama sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam menyusun strategi perencanaan, intervensi kebijakan, serta perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Meski demikian, implementasi PRP tidak selalu berjalan mulus, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Papua, sebagai provinsi paling timur Indonesia, menghadapi tantangan signifikan berupa keterbatasan akses internet yang menjadi prasyarat teknis utama pengunduhan dan pemanfaatan data rapor pendidikan (Gasper & Nurjanto, 2022; Munawaroh & Haryanto, 2021; Rumere et al., 2022; Umkabu, 2023). Situasi ini berimplikasi pada ketidakmerataan akses data dan informasi, yang berpotensi memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur digital berkontribusi langsung pada perbedaan capaian akademis siswa, di mana mereka yang memiliki akses internet lebih stabil cenderung memperoleh dukungan belajar yang lebih optimal. Kondisi ini menuntut kebijakan pendidikan berbasis data di Papua untuk mempertimbangkan faktor kontekstual, termasuk ketersediaan sarana teknologi, dukungan sumber daya, dan kapasitas guru dalam mengolah data.

Kota Jayapura, sebagai ibu kota provinsi, menjadi episentrum implementasi kebijakan PRP di Papua. Dengan visi meningkatkan taraf pendidikan masyarakat agar angka literasi dan rata-rata lama sekolah sesuai target RPJMD 2018–2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420/636.a/DPK-KT/2022 tentang penguatan kualitas pendidikan melalui PRP. Instrumen ini diimplementasikan secara menyeluruh dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK. Masalah utama yang dihadapi ialah bagaimana PRP benar-benar digunakan dalam siklus perencanaan sekolah. Literatur mutakhir menunjukkan berbagai persoalan implementasi. Pertama, tingkat adopsi dan pemahaman penggunaan PRP masih rendah, terutama di kalangan guru dan kepala sekolah (Fretes et al., 2024; Sujaya et al., 2023). Kedua, data PRP sering belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan *Rencana Kerja Sekolah* (RKS) atau *Rencana Kerja Tahunan* (RKT) (SUMARNI, 2023a; Yuningrih, 2023). Ketiga, keterbatasan kapasitas analisis data di kalangan tenaga pendidik menghambat penerjemahan temuan PRP menjadi strategi pembelajaran yang konkret (Nurcahyati et al., 2024; Setiawan & Sasongko, 2023). Selain itu, rendahnya pelatihan dan pendampingan teknis menimbulkan kesulitan integrasi hasil PRP dalam perencanaan maupun evaluasi akademik (Hartanda et al., 2024; Jannah et al., 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, literatur menawarkan sejumlah solusi umum. Pertama, pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan melalui

pelatihan berkelanjutan dalam pemanfaatan PRP. Studi Yuningrih (2023) mencontohkan efektivitas pelatihan model *Jigsaw* dalam menyusun RKS berbasis PRP yang akuntabel dan kolaboratif. Kedua, supervisi manajerial dan pengawasan berkelanjutan terbukti meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam penyusunan perencanaan berbasis data (SUMARNI, 2023b). Ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang berorientasi pada penguatan manajemen berbasis data memegang peran kunci, sebagaimana ditemukan Jamlean et al. (2024) dalam konteks SMP di Kei Kecil. Solusi umum lain yang banyak direkomendasikan adalah tata kelola kolaboratif yang melibatkan guru, komite, orang tua, dan pemangku kepentingan lain dalam forum refleksi bersama.

Lebih spesifik, sejumlah penelitian merekomendasikan integrasi sistematis PRP ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran sekolah. Fretes et al. (2024) menunjukkan adanya pengaruh signifikan supervisi akademik berbasis PRP terhadap kinerja guru SMP, menegaskan pentingnya memadukan data PRP dalam supervisi akademik. Fitrian & Hidayat (2024) melalui analisis SWOT menemukan strategi konkret untuk meningkatkan literasi siswa berbasis PRP. Nurcahyati et al. (2024) menekankan bahwa meski pemahaman data masih rendah, PRP memberikan peluang bagi perencanaan yang lebih transparan dan akuntabel. Strategi *mentor-monitoring* juga terbukti efektif meningkatkan adopsi PRP di sekolah binaan (Purwanto, 2024). Dengan demikian, solusi spesifik yang muncul dalam literatur menekankan aspek kapasitas SDM, integrasi kebijakan, supervisi, serta mekanisme mentoring berkelanjutan.

Kajian lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor pendukung dan penghambat implementasi PRP bersifat kompleks. Asbari et al. (2020) menekankan pentingnya PRP sebagai instrumen identifikasi tantangan pendidikan, sedangkan Hartanda et al. (2024) mencontohkan praktik *servant leadership* yang meningkatkan capaian indikator rapor di SMK tertentu. Namun, keterbatasan pemahaman data, minimnya infrastruktur, serta rendahnya partisipasi aktor sekolah tetap menjadi kendala serius (Rubicherlan et al., 2024). Literatur secara konsisten menyarankan keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga pemerintah daerah, untuk menciptakan ekosistem implementasi yang lebih responsif. Namun demikian, masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja di konteks lokal, khususnya di Kota Jayapura.

Kesenjangan penelitian muncul karena sebagian besar studi terdahulu berfokus pada konteks nasional atau daerah lain, sementara Kota Jayapura dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografisnya yang khas belum banyak dieksplorasi. Padahal, data BPS Kota Jayapura (2024) menunjukkan terdapat 25 SMA dan 15 SMK yang tersebar di lima kecamatan, dengan seluruhnya telah mengimplementasikan PRP. Hal ini menghadirkan peluang untuk menganalisis bagaimana PRP diadopsi, tantangan yang dihadapi, serta strategi perbaikan yang dibutuhkan di tingkat lokal. Mengingat IPM Kota Jayapura tahun 2023 telah mencapai 81,51 dengan kenaikan pada dimensi pendidikan, maka pemanfaatan PRP menjadi relevan sebagai instrumen untuk memperkuat peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua aspek: secara empiris, memberikan gambaran kontekstual tentang praktik implementasi PRP di Jayapura dan secara teoretis, memperkaya diskursus implementasi kebijakan publik dengan menekankan hubungan antara *content of policy* dan *context of implementation* (Grindle, 1980) dalam sektor pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi implementasi kebijakan PRP pada SMA/SMK di Kota Jayapura, (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitas implementasi PRP, dan (3) menyusun model implementasi kebijakan PRP yang sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan ruang lingkup analisis yang mencakup level makro (kebijakan pusat), meso (dinas pendidikan), dan mikro (sekolah), studi ini diharapkan mampu menghasilkan model implementasi PRP yang lebih preskriptif, kontekstual, dan aplikatif bagi kebijakan pendidikan di daerah.

METODE

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretivis dan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami secara mendalam implementasi kebijakan Platform Rapor Pendidikan pada SMA dan SMK di Kota Jayapura melalui pengalaman dan interpretasi para aktor kebijakan. Desain studi kasus memungkinkan peneliti menganalisis fenomena kebijakan secara holistik dalam konteks lokal, mencakup aspek sosial, budaya, geografis, dan infrastruktur pendidikan.

Waktu dan tempat penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juni 2025 di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Lokasi penelitian dipilih beberapa SMA dan SMK di Kota Jayapura, dari cakupan 25 SMA dan 15 SMK yang tersebar di lima kecamatan, yakni Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muara Tami. Dari total 40 sekolah, 36 berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Jayapura dan 4 sekolah khusus dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua. Informan dari sekolah yang dipilih dalam penelitian ini 2 SMA dan 2 SMK, masing-masing dari sekolah swasta dan negeri.

Target dan subjek penelitian

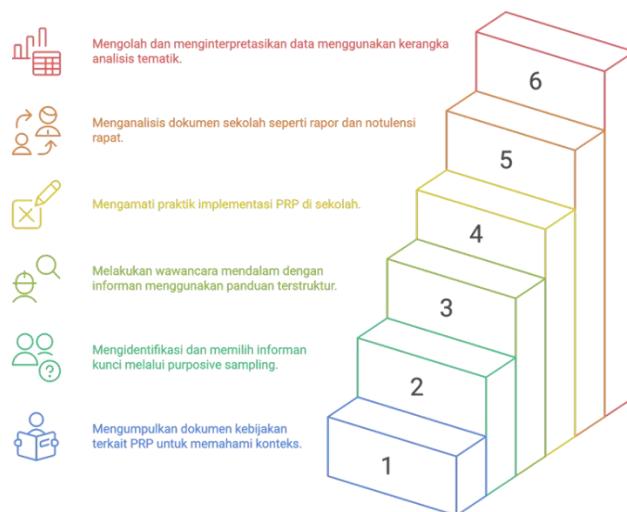
Target penelitian ini adalah implementasi kebijakan Platform Rapor Pendidikan pada satuan pendidikan menengah di Kota Jayapura. Subjek penelitian meliputi aktor kebijakan di tiga level: (1) level makro, yaitu Wakil Wali Kota, BPMP Papua, dan anggota DPRD Kota Jayapura; (2) level meso, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura serta kepala sekolah SMA/SMK; (3) level mikro, yaitu guru, operator sekolah, komite sekolah, dan siswa. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam implementasi PRP. Jumlah informan yang diwawancara adalah 28 orang, dengan distribusi 3 orang informan level makro, 5 orang informan level meso, dan 20 orang informan level mikro.

Prosedur penelitian

Prosedur penelitian mengikuti langkah-langkah sekuensial penelitian kualitatif. Pertama, peneliti melakukan studi pendahuluan dengan mengumpulkan dokumen kebijakan terkait PRP. Kedua, peneliti melakukan identifikasi dan pemilihan informan melalui purposive sampling. Ketiga, wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci sesuai panduan wawancara yang telah disusun. Keempat, peneliti melakukan observasi partisipatif di sekolah untuk melihat praktik implementasi PRP. Kelima, dokumen sekolah berupa rapor pendidikan, surat edaran, dan notulensi rapat refleksi dianalisis sebagai data pendukung. Keenam, semua data yang diperoleh diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan menggunakan kerangka analisis tematik.

Data dan instrumen penelitian

Data utama penelitian berupa data kualitatif hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan tema implementasi PRP, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi perbaikan. Validitas instrumen diuji melalui uji pakar (*expert judgment*), sementara reliabilitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member check*.

**Gambar 1.** Prosedur Penelitian.

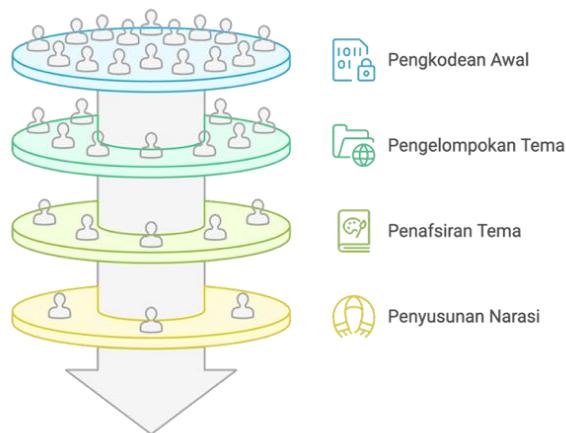
Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan tiga teknik utama, yaitu:

- a) Wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan kunci untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap implementasi PRP.
- b) Observasi partisipatif yang dilakukan di sekolah untuk mengamati praktik perencanaan berbasis data, rapat refleksi, dan penggunaan aplikasi PRP.
- c) Dokumentasi berupa pengumpulan dokumen rapor pendidikan, surat edaran dinas, notulensi rapat, serta dokumen perencanaan sekolah yang relevan.

Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik. Prosesnya meliputi transkripsi wawancara secara verbatim, pemberian kode awal pada segmen data, pengelompokan kode ke dalam tema-tema besar, penafsiran tema sesuai fokus penelitian, serta penyusunan narasi tematik. Analisis dilakukan secara iteratif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan makna. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel distribusi kode, matriks sintesis tema, dan visualisasi peta tematik.

**Gambar 2.** Proses Analisis Data.

Keabsahan data

Keabsahan data dijaga melalui strategi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan *member check*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar level kebijakan (makro, meso, mikro). Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Member check* dilakukan dengan mengonfirmasi hasil transkrip dan interpretasi awal kepada informan kunci.

Etika penelitian

Penelitian ini memperhatikan aspek etika, termasuk penghormatan terhadap hak informan, kerahasiaan data, serta persetujuan partisipasi (*informed consent*). Informan diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian, hak mereka untuk menarik diri kapan saja, dan jaminan kerahasiaan identitas. Seluruh data hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan pengembangan kebijakan pendidikan.

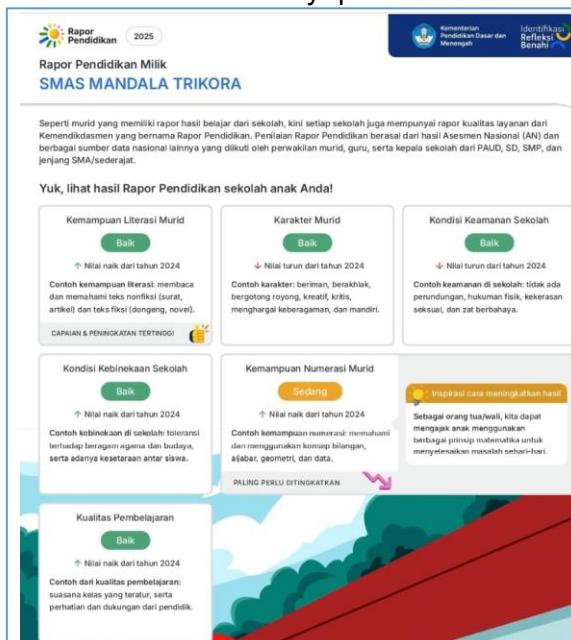
HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Platform Rapor Pendidikan

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Platform Rapor Pendidikan (PRP) di Kota Jayapura dengan unit analisis pada SMA dan SMK. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Metode, informan penelitian berjumlah 28 orang yang terdiri atas aktor kebijakan di level makro, meso, dan mikro. Distribusi informan tersebut mencakup Wakil Wali Kota Jayapura, pejabat BPMP Papua, anggota DPRD Kota Jayapura, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, beberapa kepala sekolah SMA/SMK, guru, operator sekolah, komite sekolah, serta siswa. Variasi informan ini memungkinkan diperolehnya pandangan yang kaya dan berlapis tentang bagaimana PRP dijalankan di lapangan.

Secara geografis, Kota Jayapura menaungi 25 SMA dan 15 SMK yang tersebar di lima kecamatan. Dari total 40 sekolah, sebanyak 36 berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Jayapura dan 4 lainnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua. Keempat sekolah yang dikelola provinsi tersebut merupakan sekolah dengan karakteristik khusus, yakni SMK Negeri 1 (Pariwisata), SMK Negeri 4 (Agrobisnis dan Agroindustri), SMK Negeri 3 (Sains dan Bahasa), serta SMK Negeri Olahraga. Jumlah ini menjadi konteks penting mengingat pengelolaan berbeda sering kali menimbulkan variasi dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam ketersediaan sarana dan prioritas pengembangan sekolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura tahun 2024, seluruh SMA dan SMK di wilayah ini telah mengimplementasikan PRP. Data Dinas Pendidikan/Kota Jayapura menegaskan bahwa seluruh SMA dan SMK di wilayah ini telah memanfaatkan Platform Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi berbasis data; praktik perencanaan bahkan dihubungkan ke RKAS/RABS atau RKT sesuai sumber pembiayaan program perbaikan sekolah. Namun, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemanfaatan PRP masih cenderung administratif. Banyak sekolah menggunakan hanya sebagai syarat pelaporan dan belum sepenuhnya mengintegrasikan hasil rapor ke dalam siklus perencanaan sekolah. Data kuantitatif bahkan menunjukkan adanya fluktiasi capaian, termasuk penurunan indikator literasi, iklim sekolah, dan kesejahteraan siswa di beberapa sekolah, misalnya di SMAS Mandala Trikora Jayapura.



Gambar 3. Rapor Pendidikan SMAS Mandala Trikora, Jayapura.
(Sumber: SMAS Mandala Trikora)

Sebagai contoh, gambaran mutu implementasi terlihat dari dinamika indikator di SMAS Mandala Trikora. Kompetensi membaca teks informasi turun dari 56,15% (2022) menjadi 54,75% (2023); kompetensi mengakses/menemukan isi teks dari 59,16% ke 58,05%. Pada sisi kelembagaan, indikator visi–misi sekolah menurun 59,95% menjadi 52,82%, iklim keamanan 69,59% menjadi 66,48%, dan kesejahteraan psikologis murid 60,94% menjadi 59,49%. Namun di beberapa ukuran lainnya mengalami kenaikan di tahun 2025, sebagaimana yang ada pada gambar 3.

Pola ini menunjukkan bahwa PRP bukan sekadar instrumen akuntabilitas, melainkan alat diagnosis kelembagaan yang menuntut respons perbaikan terencana. Fenomena ini selaras dengan literatur nasional, yang menyoroti rendahnya pemanfaatan PRP untuk refleksi dan perencanaan di sejumlah daerah lain (Rubicherlan et al., 2024; Shintia et al., 2023).

Dari sisi penjaminan mutu, pejabat BPMP menegaskan relevansi PRP untuk perencanaan dan pengawasan mutu:

“Sangat relevan dan bermanfaat karena menyajikan data objektif dan terintegrasi untuk mengidentifikasi kinerja dan membenahi perencanaan...”

Ia juga menekankan keterhubungan PRP dengan reakkreditasi otomatis ketika hasil rapor baik dan masa akreditasi habis, yang mencerminkan pergeseran evaluasi kelembagaan menuju berbasis data.

“Ya, data digunakan untuk reakkreditasi otomatis...”

Namun, literasi data aktor kebijakan/sekolah diakui masih menjadi kendala:

“Banyak pemangku kepentingan belum memahami cara memanfaatkan data Rapor Pendidikan...”

diikuti catatan kualitas/kelengkapan data dan infrastruktur digital yang belum merata. Strategi penanganan yang dilakukan mencakup pendampingan teknis, monitoring bersama, dan penyusunan RTL, serta pelatihan berkelanjutan.

Sebagai ujung tombak manajemen data, operator SMAN 4 menekankan kebutuhan memperluas dan merutinkan penggunaan PRP di satuan pendidikan:

“Lebih ditingkatkan frekuensi penggunaannya, sehingga tidak hanya kepala sekolah, operator, guru tertentu saja yang familiar...”

Ringkasan proses teknis di sekolah ini juga menunjukkan praktik verifikasi–validasi data (Verval PD/PTK) yang terintegrasi dengan Dukcapil/BKN dan dukungan lembar kerja untuk RTK/ARKAS, yang memperkuat keterhubungan PRP dalam siklus perencanaan.

Pada tataran kelas, guru SMAS Mandala menegaskan fungsi PRP sebagai rujukan evaluasi dan perbaikan pembelajaran:

“Rapor Pendidikan... berfungsi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pencapaian mutu pendidikan di sekolah...”; “Platform ini digunakan... mengevaluasi/ memberi uji kompetensi... hasilnya dijadikan pedoman untuk meningkatkan perencanaan pembelajaran di kelas.”

Ia menambahkan bahwa PRP membantu memahami kebutuhan belajar siswa dan menyesuaikan dukungan instruksional:

“Ya, sangat membantu... menyesuaikan pembelajaran, dan memberikan dukungan pembelajaran.”

Di sisi fitur, guru mengusulkan penguatan fungsi interaksi agar PRP kian berguna untuk strategi pembelajaran:

“Platform rapor pendidikan sudah sangat membantu... semoga dilengkapi fitur... forum diskusi/platform pembelajaran daring.”

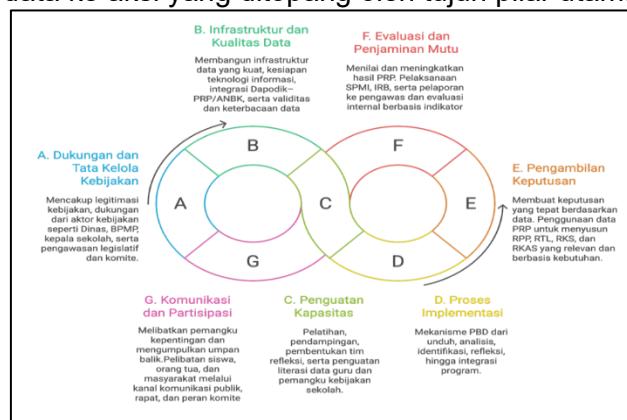
Meski demikian, terdapat pula praktik-praktik baik yang menunjukkan potensi PRP sebagai instrumen transformasi. Misalnya, SMPN Kualatungkal dan SMPN Satap 7 Pengabuan menjadikan PRP sebagai dasar Perencanaan Berbasis Data (PBD), dengan fokus pada peningkatan literasi dan numerasi siswa. Indikator keberhasilan diukur melalui peningkatan pemahaman guru dalam menganalisis rapor pendidikan serta peningkatan capaian literasi/numerasi (Harianto, 2023). Contoh serupa ditemukan pada sekolah binaan di Lombok Barat, di mana kinerja kepala sekolah dalam menyusun RKT berbasis rapor meningkat signifikan, dari skor kemajuan 56% pada siklus I menjadi 76% pada siklus II, dan mencapai 88% pada siklus III (Sumarni, 2023).

Hasil wawancara kepada 28 informan juga, dapat disusun sebuah model implementasi kebijakan Platform Rapor Pendidikan (PRP) di Kota Jayapura yang menggambarkan dinamika integratif antara struktur kebijakan, proses implementasi, serta aktor-aktor pelaksana di tingkat makro, meso, dan mikro. Model ini tidak bersifat linier, melainkan membentuk suatu *loop* berkelanjutan, yakni siklus berulang yang menggambarkan proses implementasi sebagai rangkaian langkah reflektif dan adaptif dari satu tahapan ke tahapan lain, lalu kembali untuk memperbaiki dan memperkuat proses sebelumnya. Hal ini mencerminkan hubungan timbal balik antara berbagai komponen, sekaligus menjelaskan bagaimana kebijakan PRP dipraktikkan secara kontekstual di satuan pendidikan.

Untuk memperjelas struktur model ini, berikut adalah sembilan pilar (A–I) yang membentuk dasar model implementasi PRP:

- Dukungan dan Tata Kelola Kebijakan: mencakup legitimasi kebijakan, dukungan dari aktor kebijakan seperti Dinas, BPMP, kepala sekolah, serta pengawasan legislatif dan komite.
- Infrastruktur, Pipeline, dan Kualitas Data: kesiapan teknologi informasi, integrasi Dapodik–PRP/ANBK, serta validitas dan keterbacaan data.
- Penguatan Kapasitas dan Pendampingan: pelatihan, pendampingan, pembentukan tim refleksi, serta penguatan literasi data guru dan pemangku kebijakan sekolah.
- Proses dan Koordinasi Implementasi: mekanisme PBD dari unduh, analisis, identifikasi, refleksi, hingga integrasi program.
- Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Berbasis Data: penggunaan data PRP untuk menyusun RPP, RTL, RKS, dan RKAS yang relevan dan berbasis kebutuhan.
- Evaluasi, Refleksi, dan Penjaminan Mutu: pelaksanaan SPMI, IRB, serta pelaporan ke pengawas dan evaluasi internal berbasis indikator.
- Komunikasi, Partisipasi, dan Mediasi: pelibatan siswa, orang tua, dan masyarakat melalui kanal komunikasi publik, rapat, dan peran komite.
- Dampak, Efektivitas, dan Nilai Tambah: perubahan cara mengajar, peningkatan motivasi siswa, serta perbaikan mutu layanan pendidikan.
- Hambatan Kunci dan Usulan Peningkatan: kendala implementasi yang menjadi dasar perbaikan sistem melalui pelatihan, fitur baru, dan SOP tambahan serta pendampingan melalui tim coaching dan mekanisme pengawasan berkelanjutan.

Secara faktual, implementasi PRP yang sedang berjalan di Kota Jayapura mencerminkan siklus data ke aksi yang ditopang oleh tujuh pilar utama (A–G).

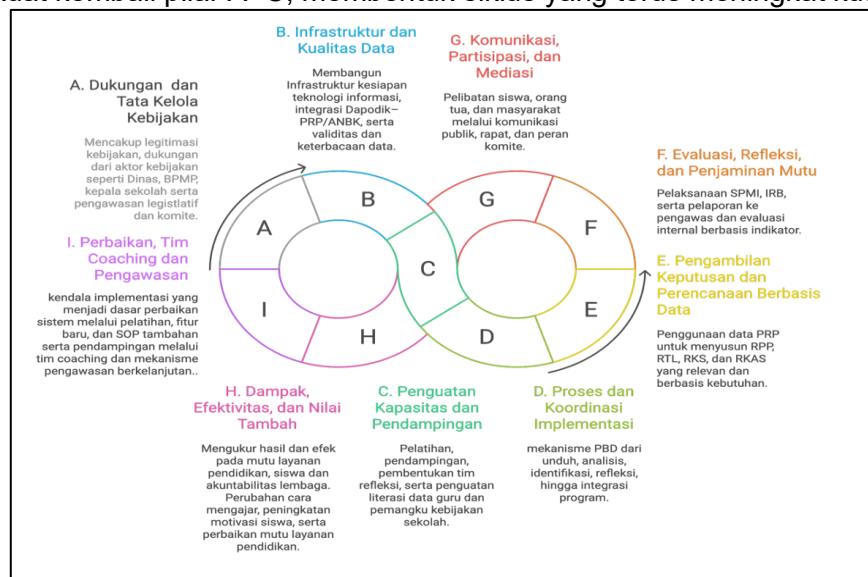


Gambar 4. Implementasi PRP di Kota Jayapura.

Pada level makro, Dinas Pendidikan dan BPMP bertugas memberikan mandat dan dukungan kebijakan, sedangkan kepala sekolah memimpin pelaksanaan di masing-masing satuan. Pada level meso dan mikro, aliran data dari Dapodik ke PRP dan ANBK telah digunakan sebagai dasar identifikasi indikator dan perencanaan, meskipun belum semua sekolah menjalankan proses ini secara menyeluruh atau rutin. Proses pengambilan keputusan dan refleksi dilakukan secara variatif, tergantung pada kapasitas SDM dan dukungan kelembagaan di sekolah. Namun, data menunjukkan bahwa implementasi yang ada cenderung bersifat parsial dan belum terintegrasi penuh sebagai siklus reflektif yang utuh. Di sinilah model implementasi optimal menjadi penting, untuk menggabungkan seluruh elemen temuan menjadi satu kerangka kerja yang sistematis dan berkelanjutan.

Model optimal mengorkestrasikan seluruh pilar (A–I) dalam satu *loop* (Siklus berulang) berkelanjutan:

- Input/Persiapan:** (A) *Governance* menetapkan mandat dan anggaran; (B) Pipeline menyiapkan integrasi data dan akses platform; (C) Kapasitas membekali guru, operator, dan komite.
- Proses Implementasi:** (D) Koordinasi memastikan proses PBD dari unduh data hingga integrasi ke program sekolah berjalan efektif; (E) Keputusan dan perencanaan memproduksi dokumen RPP, RTL, dan RKS/RKAS berbasis indikator prioritas; (G) Komunikasi menyampaikan hasil kepada siswa, orang tua, dan masyarakat.
- Output:** (F) Evaluasi dan penjaminan mutu terdokumentasi melalui SPMI dan IRB, disertai pelaporan ke pengawas serta pelaporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pengawas dan operator MARKAS Dinas. Komite sekolah mendapatkan informasi hasil PRP untuk memberikan masukan terhadap program dan kegiatan sekolah.
- Outcome:** (H) Dampak terlihat dalam kualitas pembelajaran yang meningkat, literasi/numerasi yang membaik, serta budaya refleksi dan motivasi siswa.
- Feedback/Perbaikan:** (I) Hambatan yang ditemukan ditindaklanjuti menjadi pelatihan tambahan, penyederhanaan fitur, pembaruan SOP, serta pendampingan melalui tim *coaching* dan mekanisme pengawasan berkelanjutan. Hasil dari perbaikan ini memperkuat kembali pilar A–C, membentuk siklus yang terus meningkat kualitasnya.



Gambar 5. Model usulan Implementasi PRP di Kota Jayapura.

Model ini dapat digambarkan sebagai sebuah siklus reflektif dan adaptif yang berputar dari A → B → C → D → E → F → G → H → I → kembali ke A–C. Ini mencerminkan bahwa keberhasilan implementasi PRP tidak cukup hanya pada tataran desain kebijakan, melainkan juga pada kapasitas kelembagaan untuk mengelola refleksi, tindak lanjut, dan siklus perbaikan yang berkelanjutan. Pada tahap perbaikan (pilar I), selain melalui pelatihan tambahan dan penyempurnaan fitur PRP, juga diperlukan kehadiran tim *coaching* dan mekanisme pengawasan berkelanjutan untuk memastikan bahwa strategi-strategi tindak lanjut benar-benar dijalankan dan berdampak pada peningkatan mutu. Hal ini

membedakannya dari implementasi PRP yang sedang berjalan saat ini di Kota Jayapura, yang masih terbatas pada tujuh pilar awal (A–G) dan belum sepenuhnya mengintegrasikan elemen evaluasi dampak dan mekanisme perbaikan berkelanjutan seperti yang tercakup dalam pilar H dan I.

Beberapa titik kendali kunci yang perlu diperkuat dalam model ini antara lain:

- a) SOP PBD per semester: Setiap sekolah perlu memiliki standar operasional prosedur yang jelas untuk menjalankan siklus PBD, termasuk tahapan analisis indikator, refleksi, dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan.
- b) Verval data bulanan oleh operator: Validasi dan verifikasi data secara berkala menjadi prasyarat agar data PRP yang digunakan selalu mutakhir dan relevan.
- c) Rapat bedah indikator triwulanan: Forum refleksi terjadwal antar guru, KS, dan operator penting untuk menginterpretasi data dan menyusun tindak lanjut kolektif.
- d) Penyampaian hasil PRP secara rutin & publikasi ringkas: Guru menyampaikan capaian PRP kepada siswa dan orang tua secara berkala, misalnya melalui WhatsApp atau forum kelas, guna membangun kesadaran bersama.
- e) Peran pengawas & komite: Pengawas sekolah berperan dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kesesuaian antara data, perencanaan, dan pelaksanaan program di sekolah. Sementara itu, komite sekolah memiliki peran untuk mengetahui hasil Rapor Pendidikan serta memberikan masukan terhadap program dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan data dan temuan dari PRP.

Model ini menunjukkan bahwa implementasi PRP yang optimal memerlukan integrasi antara struktur kebijakan, kapasitas teknis, dinamika kelembagaan, serta relasi sosial antar aktor. Artinya, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan dan standar, tetapi juga oleh seberapa baik seluruh pelaksana di lapangan mampu bekerja secara terkoordinasi, reflektif, dan responsif terhadap data dan kondisi nyata. Ketika semua elemen ini bekerja secara sinkron dan reflektif, PRP dapat berfungsi sebagai kompas strategis dalam peningkatan mutu pendidikan yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kontinuitas, di mana proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan tidak berhenti pada satu titik, tetapi membentuk siklus pembelajaran kelembagaan yang terus berputar dan berkembang.

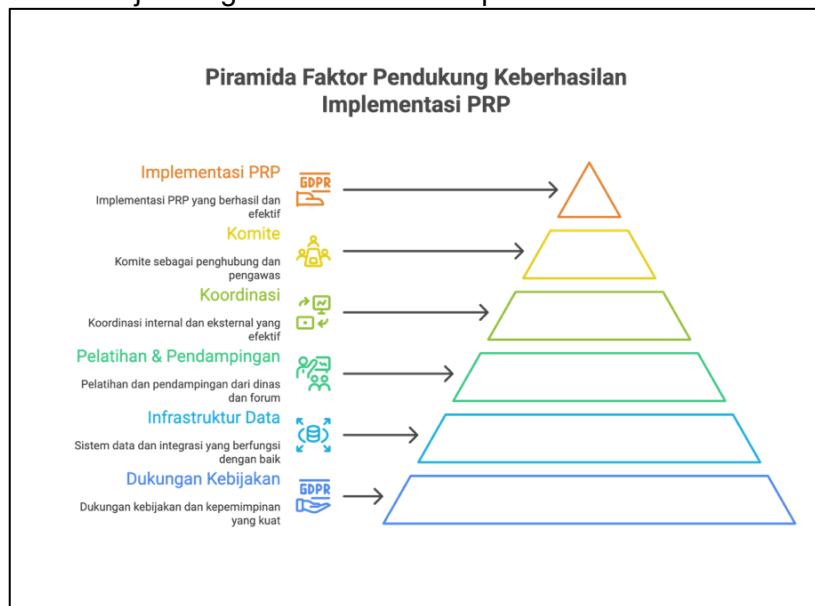
Dengan memahami model ini, para pengambil kebijakan di tingkat pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta pemangku kepentingan di sekolah dapat merumuskan strategi implementasi yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga sensitif terhadap dinamika lokal, kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan nyata komunitas pendidikan di Kota Jayapura.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan (PRP) di Kota Jayapura dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang saling terkait. Faktor-faktor ini mencerminkan dinamika kebijakan, kapasitas teknis, serta keterlibatan aktor di berbagai tingkatan. Faktor pendukung utama meliputi:

- a) Dukungan kebijakan dan kepemimpinan. Dukungan dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan BPMP memberikan legitimasi dan arah kebijakan yang jelas. Kepala sekolah berperan penting dalam memastikan kebijakan berjalan, sementara guru mendapat motivasi lebih ketika ada kepemimpinan yang kuat. Hal ini sejalan dengan teori Grindle tentang pentingnya *content of policy* yang jelas serta legitimasi dari aktor kebijakan. Dukungan ini serupa dengan praktik lokakarya PBD di Manggarai Timur, yang memperlihatkan kolaborasi lintas sektor sebagai pendorong keberhasilan implementasi PRP (Tapung, 2025).
- b) Infrastruktur data dan sistem integrasi yang berjalan baik. Integrasi Dapodik, PRP, dan ANBK memungkinkan data sekolah terkumpul secara sistematis. Keandalan pipeline data ini membantu sekolah dalam mengidentifikasi indikator mutu dan merancang strategi peningkatan. Dari perspektif Van Meter dan Van Horn, ini menunjukkan faktor sumber daya yang cukup memadai sebagai pendukung implementasi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Musakirawati et al. (2023) dan Sujaya et al. (2023) yang menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai prasyarat implementasi kebijakan berbasis data.

- c) Pelatihan dan pendampingan dari dinas, BPMP, dan forum MGMP. Forum MGMP, *in-house training*, serta bimbingan teknis dari dinas dan BPMP terbukti membantu guru, operator, dan kepala sekolah memahami cara membaca dan memanfaatkan data PRP. Peningkatan kapasitas ini memperkuat konteks implementasi sebagaimana ditegaskan Grindle, bahwa kesiapan pelaksana merupakan syarat penting keberhasilan kebijakan. Literatur lebih luas menegaskan pentingnya pelatihan model Jigsaw (Yuningrih, 2023), edukasi literasi numerasi berbasis rapor (Muslimin & Rahim, 2024), serta penguatan literasi data guru (Nurdiansari & Utomo, 2023).
- d) Koordinasi internal dan eksternal melalui tim dan rapat kerja. Tim analisis data, rapat rutin, dan komunikasi berjenjang memperkuat mekanisme koordinasi. Hal ini memastikan proses PBD (Perencanaan Berbasis Data) berjalan dengan lebih terarah. Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, koordinasi ini memperkuat faktor hubungan antar pemangku kepentingan.
- e) Komite sebagai penghubung dan pengawas. Peran komite sekolah berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Mereka menerima hasil PRP, lalu memberikan masukan terhadap program dan kegiatan sekolah berdasarkan data yang ada. Peran ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan dukungan sosial yang menurut Grindle menjadi bagian dari konteks implementasi.



Gambar 6. Faktor Pendukung Implementasi PRP di Kota Jayapura

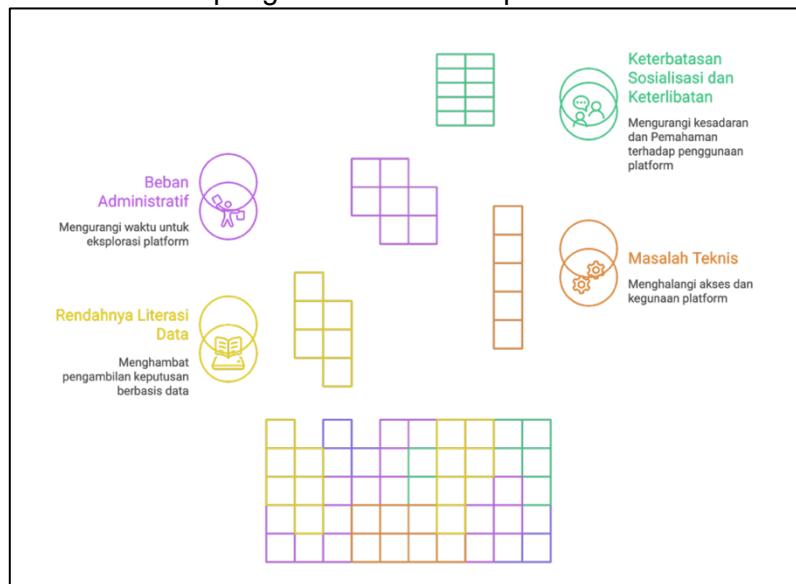
Meskipun terdapat faktor pendukung, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural dan kontekstual. Rendahnya literasi data guru menjadi hambatan utama. Guru sering kesulitan membaca grafik indikator atau menginterpretasikan data agregat, sehingga data PRP tidak dapat ditransformasikan menjadi strategi pembelajaran konkret. Rendahnya literasi data menghambat transformasi data menjadi strategi pembelajaran. Hal ini menggambarkan lemahnya konteks pelaksanaan (Grindle) dan keterbatasan sumber daya (Van Meter & Van Horn). Hambatan ini telah diidentifikasi secara luas dalam literatur (Musakirawati et al., 2023; Muslimin & Rahim, 2024).

Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital menjadi tantangan signifikan. Masalah teknis seperti akses/login, sinkronisasi data, dan tampilan platform. Masalah akses/login, sinkronisasi data yang gagal, dan tampilan PRP yang kurang ramah pengguna sering muncul. Hambatan teknis ini menurunkan motivasi pengguna untuk mengakses dan memanfaatkan PRP secara rutin. Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, ini menandakan masalah pada karakteristik lembaga pelaksana dan kecukupan sumber daya. Hal ini selaras dengan temuan Sujaya et al. (2023), yang menekankan bahwa pemanfaatan PRP di wilayah 3T hanya dapat efektif jika infrastruktur digital mendukung.

Beban administratif guru juga menjadi penghambat, di mana tugas-tugas birokratis mengurangi waktu yang tersedia untuk analisis data. Guru sering menghadapi beban administratif yang tinggi serta keterbatasan waktu untuk melakukan analisis data secara

mendalam. Akibatnya, pemanfaatan PRP cenderung sekadar formalitas tanpa tindak lanjut nyata. Hambatan ini mencerminkan keterbatasan sumber daya manusia (Van Meter & Van Horn) serta lemahnya dukungan konteks pelaksanaan (Grindle).

Lebih jauh, rendahnya keterlibatan orang tua dan komite sekolah membuat PRP kurang dipahami sebagai instrumen kolektif. Sosialisasi PRP ke siswa dan orang tua masih terbatas. Banyak siswa yang belum pernah mendengar PRP, sementara orang tua hanya mendapat informasi sekilas dari wali kelas. Minimnya keterlibatan ini membuat PRP kurang dirasakan sebagai alat bersama. Hambatan ini terkait erat dengan faktor komunikasi antar pemangku kepentingan (Van Meter & Van Horn) serta dukungan sosial masyarakat (Grindle). Padahal, penelitian Rubiherlan et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas sangat penting untuk memperkuat legitimasi dan tindak lanjut program berbasis PRP. Berikut lebih detail faktor penghambat mencakup:



Gambar 7. Faktor Penghambat Implementasi PRP di Kota Jayapura

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh keselarasan antara konten kebijakan dan konteks pelaksanaannya, sebagaimana ditegaskan oleh Grindle. Selain itu, model Van Meter dan Van Horn memperjelas pentingnya kejelasan tujuan, komunikasi antar pemangku kepentingan, dan sumber daya yang mendukung.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan PRP tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan (content), tetapi juga oleh konteks implementasinya (context), sebagaimana ditegaskan Grindle (1980). Dukungan kebijakan, infrastruktur, dan pelatihan memberi pondasi yang kuat, tetapi hambatan berupa literasi data rendah, kendala teknis, dan partisipasi yang terbatas menjadi tantangan besar. Sementara itu, teori Van Meter dan Van Horn membantu memperinci faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi: tujuan kebijakan PRP relatif jelas, sumber daya mulai tersedia, dan instrumen teknis (PRP, RTK-ARKAS) sudah ada. Namun, faktor komunikasi, literasi data, dan konsistensi pelaksanaan masih perlu diperkuat.

Dengan demikian, pemanfaatan PRP di Kota Jayapura berada pada jalur yang menjanjikan, namun membutuhkan langkah penguatan di sisi literasi data, perbaikan teknis, serta peningkatan partisipasi siswa dan orang tua. Ketiga aspek ini menjadi kunci apakah PRP akan benar-benar menjadi instrumen strategis peningkatan mutu pendidikan, atau hanya berhenti sebagai platform administratif belaka. Mengacu pada kerangka Van Meter & Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesesuaian antara tujuan, sumber daya, aktivitas, komunikasi, dan konteks lingkungan.

Dalam konteks Papua, adaptasi model implementasi PRP perlu mempertimbangkan beberapa hal:

Pertama, pemanfaatan dana otonomi khusus dan alokasi anggaran pendidikan harus diarahkan untuk menjamin tersedianya sumber daya, infrastruktur, dan pelatihan literasi data

(Ginting, 2024; Sanggrangbano et al., 2024). Kedua, adaptasi kebijakan harus mempertimbangkan dampak kebijakan otonomi khusus terhadap hasil pendidikan di Papua, sebagaimana ditunjukkan oleh Rumere et al. (2022) dan Rahman & Kartini (2023). Ketiga, pendekatan inklusif yang melibatkan anak-anak Papua dan komunitas adat diperlukan agar kebijakan tetap relevan di wilayah 3T (Marpaung et al., 2022). Dengan demikian, adaptasi PRP di Papua bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga politis dan kultural. Integrasi antara konten kebijakan yang dirancang pusat dengan konteks lokal Papua menjadi syarat utama keberhasilan.

Model implementasi yang dihasilkan memperkaya diskursus literatur kebijakan pendidikan. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi PRP tidak hanya bergantung pada instrumen kebijakan, tetapi juga pada keselarasan antara kapasitas kelembagaan, kepemimpinan, dan dukungan komunitas. Pendekatan reflektif dan partisipatif menjadi inti dari model, sejalan dengan literatur yang menegaskan perlunya adopsi berbasis konteks lokal (Hollands et al., 2019; Spillane et al., 2002). Grindle (1980) menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh keseimbangan antara isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaannya (*context of implementation*). Dalam kasus PRP di Kota Jayapura, isi kebijakan berupa instrumen evaluasi berbasis data sudah tersedia, namun konteks implementasi menunjukkan hambatan berupa keterbatasan kapasitas guru, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, model implementasi yang menekankan SOP baku, forum refleksi, dan transparansi publik merupakan upaya untuk menyesuaikan isi kebijakan dengan konteks lokal.

Model Van Meter dan Van Horn (1975) juga relevan dalam menjelaskan hasil penelitian ini. Menurut mereka, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel: tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial-ekonomi, dan disposisi pelaksana. Semua variabel tersebut muncul dalam temuan lapangan di Jayapura. Tujuan kebijakan telah jelas, tetapi sumber daya masih terbatas. Karakteristik lembaga pelaksana bervariasi, komunikasi antar aktor belum optimal, dan disposisi guru sering kali pasif terhadap data. Model implementasi yang disusun dalam penelitian ini mencoba menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat koordinasi, memperbaiki alur data, dan meningkatkan keterlibatan aktor sekolah.

Implikasi terhadap Penelitian

Hasil penelitian menyatakan bahwa PRP di Kota Jayapura cenderung berjalan administratif dan belum sistematis, sehingga pemanfaatannya akan optimal bila diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan berbasis data dengan titik kendali yang jelas. Model implementasi yang disusun melalui penelitian ini secara langsung mencoba menjembatani masalah tersebut.

Lima unsur utama dalam model implementasi ; SOP PBD, verval data bulanan, forum refleksi triwulan, transparansi hasil, dan pengawasan komite — menjadi bukti bahwa perbaikan implementasi PRP hanya dapat dicapai melalui pendekatan sistematis. Data kuantitatif yang menunjukkan penurunan capaian literasi dan indikator kelembagaan di beberapa sekolah memperkuat argumen bahwa penggunaan PRP yang administratif tidak cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hanya melalui mekanisme reflektif, partisipatif, dan transparan, PRP dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi kelembagaan.

Dengan demikian, model implementasi PRP di Kota Jayapura yang dihasilkan dari penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif. Model ini menawarkan solusi kontekstual untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan kebijakan nasional dan realitas pelaksanaan di tingkat sekolah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Platform Rapor Pendidikan (PRP) di SMA dan SMK Kota Jayapura telah mencakup seluruh satuan pendidikan, namun kualitas penerapannya masih beragam. Data kuantitatif mengungkap fluktuasi capaian, dengan beberapa indikator literasi, iklim sekolah, dan kesejahteraan siswa justru menurun. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan PRP cenderung masih bersifat administratif dan belum terintegrasi secara sistematis ke dalam siklus perencanaan berbasis data. Faktor pendukung utama antara lain dukungan kelembagaan pemerintah daerah, kepemimpinan

partisipatif kepala sekolah, serta pelatihan teknis dari BPMP. Namun, keterbatasan kapasitas analisis guru, minimnya anggaran, infrastruktur teknologi yang belum merata, dan rendahnya partisipasi komite sekolah menjadi hambatan signifikan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyusunan model implementasi PRP yang menekankan lima titik kendali: SOP perencanaan berbasis data, verval data bulanan, forum refleksi triwulanan, transparansi hasil, dan penguatan peran komite. Model ini memperkaya literatur implementasi kebijakan dengan menegaskan pentingnya ekosistem kelembagaan reflektif dan partisipatif dalam pendidikan berbasis data. Studi ini membuka ruang penelitian lanjutan untuk menguji efektivitas model di daerah lain, mengkaji keterlibatan masyarakat lebih dalam, serta mengeksplorasi integrasi PRP dengan sistem evaluasi mutu pendidikan yang lebih luas.

REKOMENDASI

Rekomendasi Berdasarkan hasil penelitian, ide penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada uji efektivitas model implementasi PRP di daerah dengan karakteristik berbeda, khususnya wilayah 3T, untuk menilai sejauh mana model yang disusun di Kota Jayapura dapat direplikasi dan disesuaikan dengan konteks lokal lain. Penelitian juga dapat memperluas fokus pada integrasi PRP dengan sistem penjaminan mutu internal sekolah (SPMI) serta mekanisme akreditasi otomatis, sehingga keterhubungan kebijakan pusat dan praktik lokal semakin jelas. Selain itu, studi lanjutan disarankan mengeksplorasi lebih dalam peran komite sekolah dan orang tua, termasuk bentuk partisipasi substantif yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data.

Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dapat memengaruhi hasil penelitian sejenis di masa depan. Pertama, keterbatasan literasi data di kalangan guru dan operator sekolah dapat membatasi kedalaman analisis dan pemanfaatan PRP. Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan internet di Papua berpotensi menghambat pengumpulan data dan konsistensi implementasi. Ketiga, keterbatasan anggaran pendidikan di sekolah-sekolah pinggiran kota sering kali membuat tindak lanjut rekomendasi PRP tidak optimal. Keempat, budaya refleksi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan masih perlu waktu untuk dibangun agar hasil penelitian dapat diinternalisasi secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada para informan penelitian dan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asbari, M., Purwanto, A., Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., Kusumaningsih, S. W., Yanthy, E., Putra, F., Winanti, W., Imelda, D., Pramono, R., & Bernarto, I. (2020). Rapor Pendidikan Indonesia: Quo Vadis Kualitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(1), 67. <https://doi.org/https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.633>
- Fitrian, A., & Hidayat, R. (2024). Analisis Swot Rapor Pendidikan Tentang Literasi Di Sd Swasta Keagamaan. *Research and Development Journal of Education*, 10(1), 303. <https://doi.org/10.30998/rdje.v10i1.21898>
- Frethes, E. B. De, Ratumanan, T. G., & ... (2024). Analisis Pengaruh Rapor Satuan Pendidikan dan Supervisi Akademik dengan Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Amahai. *Edukasia Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*. <https://doi.org/https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.1070>
- Gasper, M., & Nurjanto, F. (2022). Implementasi E-Learning Untuk Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik Di Pedalaman Papua Selatan. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 7(2), 90–100. <https://doi.org/10.53544/sapa.v7i2.354>
- Ginting, A. M. (2024). The Role of the Special Autonomy Fund to Improve the Public Service in the Papua Province. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 47–60. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.3925>
- Hartanda, Y., Bakhri, S., & Aliyah, H. (2024). Best Practice Servant Leadership Dalam Meningkatkan Rapor Pendidikan Pada SMKS Islam Ypi 2 Way Jepara. *As-Salam*

- Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 13(1), 122–144.
<https://doi.org/10.51226/assalam.v13i1.687>
- Hollands, F. M., Pan, Y., & Escueta, M. (2019). What Is the Potential for Applying Cost-Utility Analysis to Facilitate Evidence-Based Decision Making in Schools? *Educational Researcher*, 48(5), 287–295. <https://doi.org/10.3102/0013189x19852101>
- Jamlean, L., Rahabav, P., Papilaya, J., & ... (2024). Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajerial dalam Meningkatkan Mutu Berbasis Rapor Pendidikan di SMP Negeri 13 Kei Kecil. *Edukasia Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*. <https://doi.org/https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.1062>
- Jannah, U. R., Basori, I. S., Amiruddin, M., Rifanda, A. R., & Dwi Agustin, S. P. (2024). Efektivitas Analisis Akar Masalah “Metode Pembelajaran” Pada Rapor Pendidikan Sekolah Dasar Penggerak Angkatan I. *Kwangsang: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(2), 539. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n2.p539--559>
- Marpaung, R. W., Sinaga, S. B., & Womsiwor, S. (2022). Inclusive Education Curriculum Development for Indigenous Students in Papua. *SHS Web of Conferences*, 149, 01023. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214901023>
- Munawaroh, S., & Haryanto, T. (2021). Development of Infrastructure And Economic Growth of Papua Province. *Media Trend*, 16(1), 19–31. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v16i1.7454>
- Musakirawati, M., Jemmy, J., Anggriawan, F., Triansyah, F. A., Akib, A., & Tahir, A. (2023). Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan Indonesia Terhadap Perencanaan Berbasis Data. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 7(2), 201–208. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v7n2.p201-208>
- Muslimin, T. P., & Rahim, A. (2024). Penguatan Literasi Numerasi UPT SPF SDN Sangir Melalui Fun Math With Games Educative Dan Edukasi Data Rapor Pendidikan. *Ipmas*, 4(3), 342–354. <https://doi.org/10.54065/ipmas.4.3.2024.501>
- Nurcahyati, E., Dirman, Haryati, T., & Nurkolis. (2024). Peluang Dan Tantangan Perencanaan Berbasis Data Dengan Memanfaatkan Rapor Pendidikan. In ... *Pendidikan: Kajian dan Implementasi* (pp. 78–95). journalpedia.com. <https://journalpedia.com/1/index.php/jpki>
- Nurdiansari, N., & Utomo, A. P. (2023). Pemanfaatan Rapor Pendidikan Untuk Penyusuanan Program Peningkatan Literasi Di SDN 001 Teluk Alulu Kecamatan Maratua Kabupaten Berau Pada Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (Jimpian)*, 3, 97–104. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2925>
- Purwanto, W. (2024). Penerapan Strategi Mentor-Mentoring Bermedia Linktree Untuk Meningkatkan Adoption Rate Rapor Pendidikan Sekolah Binaan. *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan*, 21(1), 28–36. <https://doi.org/10.54124/jlmp.v21i1.124>
- Rahman, Z., & Kartini, D. S. (2023). Analisis Dampak Otonomi Khusus Dalam Upaya Optimalisasi Sektor Pendidikan Di Provinsi Papua. *Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 127. <https://doi.org/10.20961/sp.v18i2.72392>
- Rubiherlan, Y., Pristi, M., Nursanti, F. E., Handayani, S., & Muchtar, H. S. (2024). Pemanfaatan Rapor Pendidikan Pada Pengembangan Program Di SDN Puncak 2. *Jurnal Visionary Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 12(1), 165. <https://doi.org/10.33394/vis.v12i1.10610>
- Rumere, V., Sugiyanto, C., & Sulistyaningrum, E. (2022). The Impact of Special Autonomy on Education and Health Outcomes. *Jejak*, 15(1), 114–138. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.32301>
- Sanggrangbano, A., Antoh, A. E., & Timisela, S. I. (2024). The Impact of Special Autonomy Fiscal Policy on Papua’s Economic Development. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.32535/ijafap.v7i1.2878>
- Setiawan, W. E., & Sasongko, R. N. (2023). Pengelolaan Peningkatan Mutu Pembelajaran Numerasi Berdasarkan Hasil Rapor Pendidikan Di Smpr 01 Bengkulu Utara. *Manajer Pendidikan: Jurnal* <https://ejournal.unib.ac.id/manajerpendidikan/article/view/32238>
- Shintia, D., Asbari, M., Khairunisa, F., & Azizah, N. (2023). Rapor Pendidikan Indonesia: Sudah Sampai Mana Pendidikan Indonesia? *J.L*, 2(01), 103–106. <https://doi.org/10.70508/literaksi.v2i01.401>

- Spillane, J. P., Diamond, J. B., Burch, P., Hallett, T., Jita, L. C., & Zoltner, J. (2002). Managing in the Middle: School Leaders and the Enactment of Accountability Policy. *Educational Policy*, 16(5), 731–762. <https://doi.org/10.1177/089590402237311>
- Sujaya, K. A., Naqiyah, A., Putri, B. E. D., Heriani, Bq. M. R., Lestari, A. S., Sari, R. P., Adawiyah, R., & Pramunita, R. (2023). Pengenalan Rapor Pendidikan Pada SDN 2 Taman Ayu. *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.29303/rengganis.v4i1.373>
- SUMARNI, B. (2023a). Berdasarkan Rapor Satuan Pendidikan Dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan Dapat Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah. *Academia Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 3(1), 10–16. <https://doi.org/10.51878/academia.v3i1.2046>
- SUMARNI, B. (2023b). Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah Menyusun Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Rapor Satuan Pendidikan. *Manajerial Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2(4), 464–470. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v2i4.1960>
- Tapung, M. (2025). Peningkatan Mutu Rapor Pendidikan Melalui Lokakarya PBD Dengan Pola LRB Pada Tingkat Sekolah Dasar Di Manggarai Timur. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(10), 3473–3484. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i10.2818>
- Umkabu, T. (2023). The impact of supervisory management and service-learning pedagogy on the development strategy of junior high schools. *Journal of Pedagogical Research*. <https://doi.org/10.33902/jpr.202323857>
- Yuningrih, D. (2023). Penyusunan RKS Berbasis Rapor Pendidikan Melalui Pelatihan Model Jigsaw Bagi SMKN 1 Boyolali. *Edu Cendikia Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(01), 28–34. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i01.2230>